

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISU HOAKS DAN LITERASI DIGITAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERDAMAIAAN

**Delon Tantri Wijaya¹, Stevanus Gerald Marconus², Alvin Wijaya³, Ronald
Pratama⁴, Kevin Clariant⁵, Aryusmar⁶, Markus Kurniawan⁷**

delon.wijaya001@binus.ac.id¹, stevanus.marconus@binus.ac.id²,
alvin.wijaya014@binus.ac.id³, ronald.pratama@binus.ac.id⁴, kevin.clariant@binus.ac.id⁵,
aryusmar@binus.ac.id⁶, markus.kurniawan@binus.ac.id⁷

Bina Nusantara

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi secara signifikan, khususnya dalam konteks mewujudkan perdamaian sesuai tujuan SDGs ke-16. Maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial telah menggeser pola komunikasi publik, menciptakan tantangan serius berupa polarisasi sosial dan ketidakpercayaan antarindividu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penyebaran informasi palsu serta dampak tingkat literasi digital terhadap stabilitas sosial dan perdamaian. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memanfaatkan survei kuesioner daring untuk mengumpulkan data komprehensif terkait perilaku pengguna media sosial. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat dengan literasi digital yang baik mampu memverifikasi informasi secara kritis, sehingga menjadi filter alami terhadap provokasi. Namun, masih terdapat kerentanan pada kelompok masyarakat yang kesulitan membedakan fakta dan opini, yang berpotensi memicu konflik horizontal akibat disinformasi. Temuan ini menekankan kebutuhan mendesak akan intervensi edukasi yang memperkuat kompetensi digital demi menjaga keharmonisan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan berpikir kritis, pemahaman etika digital, dan partisipasi aktif dalam menciptakan ruang digital yang damai dan inklusif.

Kata kunci: Hoaks, Literasi Digital, Sdgs 16, Persepsi Masyarakat, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka mewujudkan tatanan global yang berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai peta jalan pembangunan dunia. Salah satu pilar utamanya adalah SDGs 16, yang menempati posisi strategis dengan fokus pada terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif. Tujuan mulia ini secara spesifik menyoroti pentingnya perdamaian sebagai fondasi utama. Namun, dalam era digital yang ditandai dengan arus informasi yang deras, upaya mewujudkan perdamaian menghadapi tantangan kompleks berupa maraknya persebaran informasi palsu atau hoaks (Localises SDGs Indonesia, 2018).

Hoaks telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang mengancam sendi-sendi sosial. Informasi yang sengaja direkayasa ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi sosial, mengikis kepercayaan, dan pada akhirnya mengancam stabilitas nasional serta kerukunan sosial. Dalam konteks Indonesia yang memiliki penetrasi internet yang tinggi, kerentanan terhadap dampak hoaks ini semakin nyata dan berpotensi menghambat terwujudnya perdamaian (OECD, 2024; Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025).

Transformasi digital yang menghadirkan kemudahan akses informasi ternyata menyimpan paradigma ganda. Platform digital dan media sosial, meskipun telah mendemokratisasikan akses informasi, juga menjadi medium ampuh untuk penyebaran konten provokatif dan tidak terverifikasi. Algoritma yang cenderung memprioritaskan engagement atas akurasi turut memperparah situasi ini, menciptakan ruang gema (echo

chambers) yang mempertajam perbedaan dan mempersulit dialog yang sehat (Utami & Gischa, 2021).

Di tengah tantangan ini, literasi digital muncul sebagai elemen krusial dalam menjaga perdamaian. Literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan teknis, melainkan kompetensi kompleks yang mencakup kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan kesadaran akan tanggung jawab dalam ruang digital. Masyarakat dengan literasi digital yang baik akan mampu menjadi filter alami terhadap hoaks, sehingga dapat melindungi diri dan lingkungannya dari dampak negatif informasi palsu (Siberkreasi, n.d.).

Persepsi masyarakat terhadap hoaks dan tingkat literasi digital memiliki korelasi langsung dengan terwujudnya perdamaian sosial. Masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung lebih rentan terhadap hoaks, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan menghambat terwujudnya masyarakat yang harmonis. Sebaliknya, masyarakat yang melek digital akan mampu memanfaatkan akses informasi secara optimal untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, memahami bagaimana masyarakat memandang hoaks dan sejauh mana literasi digital telah terinternalisasi menjadi krusial untuk merawat dan memperkuat perdamaian di tengah tantangan era digital (LPII, 2019).

Penelitian Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji dinamika penyebaran informasi palsu dan urgensi literasi digital, namun sebagian besar studi meninjau secara terpisah atau dalam konteks yang terbatas. Tinjauan literatur menunjukkan fokus dominan pada isu politik praktis dan kompetensi teknis semata. Misalnya, studi oleh Pardede dan Harahap (2023) dalam "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Polarisasi Politik di Indonesia Pasca-Pemilu 2024" dan Ramadhan dan Santoso (2022) dalam "Hoaks Sebagai Ancaman Kohesi Sosial di Masa Pandemi" menyoroti bagaimana hoaks berfungsi sebagai katalisator polarisasi tajam selama periode tahun politik dan luar elektoral. Di sisi lain, riset terkait literasi digital (misalnya, Kominfo dan Siberkreasi, 2021) lebih banyak berfokus pada pemetaan kompetensi teknis dan etika digital. Demikian pula, analisis perilaku penyebaran hoaks seperti studi Wahyuni (2024) yang menyoroti faktor psikologis individu, belum menyentuh secara mendalam dampaknya terhadap konstruksi perdamaian sosial dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Namun, terdapat kesenjangan (gap) dalam literatur yang ada, di mana belum banyak penelitian yang secara spesifik menghubungkan variabel literasi digital dengan persepsi masyarakat terhadap perdamaian sosial dalam konteks SDGs 16. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada dampak hoaks terhadap elektabilitas politik atau kerusuhan fisik, namun kurang mengeksplorasi bagaimana literasi digital membentuk resistensi kognitif masyarakat untuk secara sadar menjaga perdamaian. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan tingkat literasi digital bukan hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi sebagai instrumen sosial untuk meredam konflik. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi apakah peningkatan kemampuan verifikasi dan analisis kritis berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk tidak terprovokasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial yang dicita-citakan dalam SDGs.

Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat pengguna media sosial terhadap penyebaran hoaks di media digital, yang secara signifikan memengaruhi stabilitas dan upaya mewujudkan perdamaian sosial. Persepsi ini berkaitan erat dengan tingkat literasi digital yang dimiliki masyarakat, mencakup kemampuan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, serta menyikapi informasi palsu, yang berkontribusi pada kerentanan atau ketahanan mereka terhadap provokasi. Hubungan antara tingkat literasi digital dengan

kesadaran akan pentingnya menjaga perdamaian di tengah maraknya isu hoaks menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan harapan bahwa temuan yang diperoleh dapat memberikan dasar strategis untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat serta menciptakan ekosistem digital yang lebih damai dan harmonis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat pengguna media sosial terhadap bahaya hoaks sebagai ancaman bagi perdamaian sosial, sekaligus mengukur tingkat literasi digital yang mencakup perilaku mereka dalam menyikapi informasi di dunia maya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara kemampuan literasi digital yang dimiliki masyarakat dengan tingkat kesadaran mereka untuk menjaga perdamaian di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana literasi digital dapat berperan dalam membentuk perilaku sosial yang positif guna mendukung terciptanya stabilitas dan perdamaian di tengah arus informasi digital.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2019), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara objektif tingkat literasi digital masyarakat pengguna media sosial serta menganalisis pengaruhnya terhadap persepsi mereka mengenai bahaya hoaks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang terukur dan akurat mengenai korelasi antara kemampuan literasi digital dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga perdamaian sosial di era informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui Hasil angket yang disebarluaskan kepada 100 responden gen z, maka didapatkan data sebagai berikut :

Jumlah Angket yang Disebar	Jumlah Angket yang Kembali	Jumlah Angket yang Terjawab
100	100	100

Results

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Saya sering menemukan berita/informasi yang ternyata hoaks di media sosial.	2%	5%	24%	37%	52%
2	Saya merasa mampu membedakan berita asli dengan berita hoaks.	3%	8%	24%	45%	20%
3	Saya terbiasa memeriksa kebenaran suatu berita sebelum membagikannya kepada orang lain.	6%	10%	10%	39%	35%
4	Saya sering menerima berita hoaks dari grup percakapan (WhatsApp/Telegram) keluarga/teman.	12%	18%	19%	33%	18%
5	Saya percaya bahwa penyebaran hoaks dapat mengancam kerukunan dan perdamaian sosial.	0%	0%	6%	39%	55%

6	Saya merasa literasi digital (kemampuan memfilter informasi online) penting dimiliki oleh semua orang.	0%	2%	7%	28%	63%
7	Saya biasanya memeriksa sumber berita (misalnya dari media resmi atau akun terverifikasi) sebelum mempercayainya.	7%	5%	18%	30%	40%
8	Saya pernah tidak sengaja membagikan informasi yang kemudian saya ketahui adalah hoaks.	15%	23%	19%	30%	13%
9	Saya merasa banyak orang di sekitar saya masih mudah percaya dengan berita hoaks.	4%	7%	23%	42%	24%
10	Menurut saya, masyarakat dengan literasi digital yang tinggi lebih mampu menjaga perdamaian di tengah perbedaan pendapat.	1%	0%	13%	40%	46%
11	Saya setuju bahwa kampanye untuk meningkatkan literasi digital perlu diperkuat di Indonesia untuk menjaga persatuan.	1%	3%	10%	34%	52%

Discussion

Hasil survei kuantitatif menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya hoaks bagi stabilitas sosial, terdapat kesenjangan (gap) antara persepsi kemampuan diri (self-efficacy) dengan perilaku aktual dalam penyebaran informasi. Responden menyadari bahwa lingkungan digital mereka telah terpapar polusi informasi yang signifikan, namun optimisme terhadap kemampuan literasi digital dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga perdamaian.

Intensitas Paparan Hoaks di Lingkungan Sosial Data menunjukkan tingkat paparan hoaks yang sangat tinggi di kalangan responden. Sebanyak 89% responden (gabungan skala 4 dan 5 pada poin 1) mengaku sering menemukan informasi palsu di media sosial. Fenomena ini diperparah dengan fakta bahwa lingkungan terdekat justru menjadi salah satu saluran penyebaran. Sebanyak 51% responden (poin 4) menyatakan sering menerima berita hoaks melalui grup percakapan keluarga atau teman (seperti WhatsApp/Telegram). Hal ini mengindikasikan bahwa ruang privat yang seharusnya berbasis kepercayaan (trust) justru rentan disusupi oleh informasi yang tidak terverifikasi, yang berpotensi memicu ketegangan dalam relasi sosial terdekat.

Kompetensi Literasi Digital dan Paradoks Perilaku Terdapat temuan menarik terkait kepercayaan diri responden terhadap kemampuan literasi digital mereka. Mayoritas responden merasa mampu membedakan berita asli dan palsu (65%, poin 2) dan mengklaim terbiasa memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya (74%, poin 3). Hal ini didukung oleh 70% responden (poin 7) yang menyatakan rutin memeriksa sumber berita dari akun resmi. Namun, terdapat paradoks ketika 43% responden (poin 8) mengakui pernah secara tidak sengaja membagikan hoaks. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun responden merasa memiliki literasi yang cukup, kompleksitas manipulasi informasi terkadang masih mampu menembus filter kognitif mereka. Selain itu, 66% responden (poin 9) merasa orang di sekitar mereka masih mudah percaya hoaks, menunjukkan adanya bias persepsi di mana responden merasa "lebih melek digital" dibandingkan orang lain (third-person effect).

Hoaks sebagai Ancaman Perdamaian Sosial Kesadaran responden terhadap dampak

destruktif hoaks sangatlah tinggi. Hampir seluruh responden, yakni sebesar 94% (poin 5), setuju bahwa penyebaran hoaks dapat mengancam kerukunan dan perdamaian sosial. Temuan ini memvalidasi urgensi penelitian bahwa disinformasi bukan sekadar masalah teknis komunikasi, melainkan masalah stabilitas nasional. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya merindukan ekosistem informasi yang sehat agar harmoni sosial tetap terjaga.

Urgensi Literasi Digital untuk Kohesi Sosial Responden menempatkan literasi digital sebagai fondasi utama dalam merawat perdamaian. Sebanyak 86% responden (poin 10) meyakini bahwa masyarakat dengan literasi digital tinggi lebih mampu menjaga perdamaian di tengah perbedaan pendapat. Hal ini sejalan dengan dukungan mutlak sebesar 91% responden (poin 6) yang merasa kemampuan memfilter informasi penting dimiliki semua orang. Sebagai implikasinya, 86% responden (poin 11) mendesak agar kampanye peningkatan literasi digital di Indonesia diperkuat demi menjaga persatuan.

Secara keseluruhan, hasil diskusi ini menegaskan bahwa literasi digital memiliki korelasi positif dengan upaya menjaga perdamaian. Meskipun masyarakat sudah memiliki dasar kemampuan verifikasi, tingginya paparan hoaks dari lingkungan terdekat dan masih adanya insiden penyebaran hoaks yang tidak disengaja menuntut adanya edukasi literasi digital yang lebih masif, tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek kebangsaan dan perdamaian.

1. Dinamika Literasi Digital dan Hoaks di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa paparan terhadap hoaks di Indonesia masih sangat tinggi, di mana mayoritas responden sering menemukan informasi palsu di media sosial. Namun, hal ini diimbangi dengan tingginya kesadaran kolektif bahwa literasi digital merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas nasional dan kerukunan sosial.

2. Potensi Literasi Digital untuk Perdamaian

- a. Masyarakat meyakini bahwa kemampuan memfilter informasi dapat mencegah polarisasi dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat.
- b. Tingginya dukungan masyarakat (94%) yang menyadari bahwa hoaks adalah ancaman nyata bagi perdamaian, menciptakan momentum untuk perubahan perilaku.
- c. Adanya permintaan yang kuat dari masyarakat untuk memperkuat kampanye literasi digital sebagai solusi jangka panjang.

3. Tantangan dalam Ekosistem Informasi

- a. Penyebaran hoaks justru masif terjadi di saluran komunikasi tertutup seperti grup keluarga/teman (WhatsApp), yang sering kali luput dari moderasi publik.
- b. Terdapat responden merasa mampu mendeteksi hoaks, namun data menunjukkan 43% pernah menyebarkannya secara tidak sengaja.
- c. Kepercayaan berlebihan terhadap informasi yang dikirim oleh orang terdekat sering kali menumpulkan daya kritis dan verifikasi..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas sosial di tengah arus informasi yang tidak terkendali. Mayoritas responden, sebagai pengguna aktif media sosial, menganggap bahwa penyebaran hoaks merupakan ancaman nyata yang dapat merusak tatanan sosial yang harmonis. Kesadaran ini mendorong persepsi yang kuat bahwa kemampuan memfilter informasi adalah kompetensi wajib yang harus dimiliki untuk merawat perdamaian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya hoaks sangatlah tinggi, di mana 94% responden setuju bahwa hoaks dapat mengancam kerukunan dan perdamaian sosial. Selain itu, dukungan terhadap urgensi literasi digital juga sangat masif, dengan 91% responden sepakat bahwa kemampuan ini penting dimiliki semua orang. Namun, terdapat paradoks antara persepsi diri dan realitas perilaku, di mana meskipun mayoritas merasa mampu membedakan berita asli (65% responden), sebanyak 43% responden mengakui pernah secara tidak sengaja membagikan informasi yang ternyata hoaks. Hal ini menegaskan bahwa tingginya kepercayaan diri (self-efficacy) belum sepenuhnya menjamin ketahanan terhadap manipulasi informasi yang canggih.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki niat yang kuat untuk menjaga perdamaian dan merasa cukup kompeten secara digital, tantangan eksternal berupa paparan hoaks yang intensif—terutama dari lingkungan terdekat seperti grup percakapan keluarga (51% responden)—masih sulit dihindari. Masyarakat menyadari bahwa literasi digital yang tinggi adalah kunci untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat (86% responden setuju), namun kerentanan di ruang privat masih menjadi celah yang perlu diatasi.

Penelitian ini mengintegrasikan temuan bahwa kesadaran kolektif akan perdamaian dan kemampuan teknis verifikasi adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dalam ekosistem digital. Namun, fakta bahwa penyebaran hoaks sering terjadi di lingkup privat dan kadang dilakukan tanpa sengaja menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk strategi literasi yang lebih mendalam, tidak hanya sekadar mengetahui cara cek fakta, tetapi membangun kebiasaan kritis yang konsisten sebelum membagikan informasi.

Berdasarkan temuan ini, premis baru yang dapat disusun adalah bahwa tingginya tingkat literasi digital masyarakat berbanding lurus dengan ketahanan sosial terhadap konflik, namun hal ini harus didukung oleh kewaspadaan yang konstan di ruang privat. Modifikasi pendekatan edukasi mungkin diperlukan untuk mencakup strategi komunikasi di dalam grup keluarga dan komunitas tertutup, di mana kepercayaan interpersonal sering kali mengaburkan daya kritis terhadap validitas informasi. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, kampanye literasi digital perlu diperkuat dengan fokus pada psikologi penyebaran informasi dan etika digital. Masyarakat perlu dilatih untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi yang cerdas, tetapi juga "penjaga gerbang" (gatekeeper) yang bertanggung jawab di lingkungan sosial mereka masing-masing. Selain itu, platform media sosial dan pemerintah perlu bersinergi menciptakan mekanisme verifikasi yang lebih mudah diakses oleh publik. Mengingat tingginya paparan hoaks, pembentukan budaya "saring sebelum sharing" harus terus digalakkan secara intensif sebagai norma sosial baru.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan literasi digital dapat bertransformasi dari sekadar kemampuan teknis menjadi sebuah gerakan sosial yang mampu menciptakan ruang digital yang damai dan inklusif, sehingga cita-cita masyarakat yang harmonis sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: Wiley Computer Publishing.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. Washington, D.C.: The Aspen Institute.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori*.

- dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Juditha, C. (2019). Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, 4(1), 31-44.
- Kementerian Kominfo. (2021). Roadmap Literasi Digital 2021-2024. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Kominfo. (2023). Laporan Isu Hoaks Tahunan 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025, Januari 8). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Kurikulum Literasi Digital. Siberkreasi.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2019). Intensitas Penggunaan Media Sosial dan Perilaku "Sharing" Informasi di Kalangan Pengguna Medsos. Jurnal Pekommas, 4(1).
- MASTEL. (2022). Hasil Survei Wabah Hoaks Nasional 2021. Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024, Maret 4). Facts not fakes: Tackling disinformation, strengthening information integrity. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/facts-not-fakestackling-disinformation-strengthening-information-integrity_d909ff7a-en.html
- Pengadilan Negeri Solok. (n.d.). Definisi dan kategori informasi. Pengadilan Negeri Solok. <https://pn-solok.go.id/index.php/dokumentasi/27-layanan-publik/27-definisi-dan-kategori-informasi>
- Rahadi, D. R. (2020). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(1), 58-70.
- Siberkreasi. (2021). Modul Cakap Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika & Siberkreasi.
- Siberkreasi. (n.d.). Modul literasi digital. Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. <https://gnld.siberkreasi.id/modul/>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Triandoyo, R. B. (2021, Januari 14). Informasi. E-learning SMA Negeri 1 Purbalingga. <https://elearning.sma1purbalingga.sch.id/mod/page/view.php?id=22664>
- UNESCO. (2022). Journalism is a Public Good: World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2023). Empowering Digital Citizens: Media and Information Literacy. Paris: UNESCO.
- United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023. New York: United Nations.
- United Nations. (n.d.). Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies. United Nations. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>
- Utami, S. N., & Gischa, S. (2021, Juni 15). Teknologi informasi digital: Pengertian, lingkup kerja, kelebihan, dan kelemahan. Kompas Skola. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/15/152219769/teknologi-informasi-digital-pengertian-lingkup-kerja-kelebihan-dan>
- Yulianto, H. S. (2024, Februari 9). Ciri-ciri informasi digital yang perlu dipahami. Bola.com. <https://www.bola.com/ragam/read/5523420/ciri-ciri-informasi-digital-yang-perlu-dipahami>